

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hasil Analisis Data serta Pembahasannya yang Telah dijelaskan sebelumnya terikat Pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan juga Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja yang Diprosikan dengan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Daerah Lamongan pada Periode 2011 – 2025, yang dapat Disimpulkan beberapa Hal Berikut Ini :

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan, dengan nilai t-hitung sebesar $-0,552219$ yang lebih kecil dibandingkan t-tabel $1,78229$ dan nilai probabilitas sebesar $0,5918$ yang jauh lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$, sehingga hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB yang terjadi di Kabupaten Lamongan belum serta-merta diiringi oleh tekanan kenaikan upah minimum, mengingat struktur ketenagakerjaan di daerah ini masih sangat didominasi oleh sektor pertanian informal, yang mana sekitar 62 persen tenaga kerja merupakan buruh tani musiman yang tidak berada dalam jangkauan perlindungan UMK. Selain itu, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan juga menjadikan formula penetapan UMK lebih banyak ditentukan oleh variabel yang bersifat nasional, sehingga peran PDRB tingkat kabupaten

menjadi tidak sepenuhnya dominan, dan kondisi ini sejalan dengan fenomena *jobless growth* yang juga tercermin dari posisi UMK Kabupaten Lamongan yang hanya berada di peringkat ke-14 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan, dengan nilai t-hitung sebesar 6,429845 yang jauh lebih besar dibandingkan t-tabel 1,78229 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. Temuan ini juga merupakan hasil yang paling kuat dan konsisten dalam penelitian ini, mengingat IPM memiliki nilai probabilitas paling kecil di antara ketiga variabel independen yang diteliti. Hal ini juga tercermin secara nyata di Kabupaten Lamongan, yang mana IPM meningkat secara konsisten dari 70,39 poin pada tahun 2011 menjadi 76,81 poin pada tahun 2025, bahkan telah melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 74,25 poin, dan capaian ini juga menempatkan Kabupaten Lamongan pada posisi 5 besar kabupaten dengan IPM tertinggi di Jawa Timur, sejalan dengan naiknya UMK dari Rp 900.000 pada tahun 2011 menjadi Rp 3.012.164 pada tahun 2025.
3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan, dengan nilai t-hitung sebesar 1,115625 yang lebih kecil dibandingkan t-tabel 1,78229 dan nilai probabilitas sebesar 0,2884, sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak, meskipun arah koefisiennya bernilai positif. Kondisi ini juga tergambar jelas dari data di Kabupaten Lamongan, yang mana TPT sempat melonjak hingga 7,12 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, namun lonjakan

tersebut juga tidak diikuti oleh perubahan signifikan pada UMK, yang bahkan tidak mengalami kenaikan sama sekali pada tahun 2021, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penetapan UMK lebih banyak mengikuti formula pengupahan nasional dibandingkan kondisi pengangguran daerah secara langsung.

4. Pada ketiga variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama juga terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F-statistik sebesar 41,16729 dengan probabilitas sebesar 0,000003 yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dan berdasarkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,895912, dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas tersebut juga mampu menjelaskan variasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan sebesar 89,59 persen, sementara sisanya sebesar 10,41 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti kebijakan pengupahan nasional, tingkat inflasi, biaya hidup layak, kondisi fiskal pemerintah daerah.

5.2. Saran

Bertolak pada Kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas bahwa mempunyai Saran – Saran, dan Berikut beberapa Saran yang sudah dapat diajukan kepada Pihak – Pihak yang Terkait. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan mengingat Pertumbuhan Ekonomi terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Lamongan sebaiknya mulai mendorong transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian yang sifatnya tradisional menuju

agroindustri yang lebih modern, sehingga mampu menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah yang lebih besar. Langkah ini dapat diwujudkan melalui pembangunan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, pemberian kemudahan investasi di sektor agroindustri, serta pembenahan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan jalur logistik, agar nilai tambah produk pertanian Lamongan dapat lebih optimal dan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan tenaga kerja.

1. Mengingat Pertumbuhan Ekonomi terbukti belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan tenaga kerja, hal ini juga mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya dirasakan oleh tenaga kerja, khususnya yang bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lamongan sebaiknya mulai mendorong transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian yang sifatnya tradisional menuju agroindustri yang lebih modern, sehingga mampu menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah yang lebih besar. Langkah ini juga dapat diwujudkan melalui pembangunan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, pemberian kemudahan investasi di sektor agroindustri, serta pembenahan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan jalur logistik, agar nilai tambah produk pertanian Lamongan dapat lebih optimal dan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan tenaga kerja.
2. Mengingat IPM terbukti menjadi variabel dengan pengaruh paling kuat dan konsisten terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan, pemerintah daerah perlu terus memprioritaskan investasi pada sektor pendidikan

dan kesehatan sebagai strategi jangka panjang, karena peningkatan kualitas modal manusia juga akan berdampak positif terhadap kemampuan daerah dalam menetapkan upah minimum yang lebih layak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memperluas akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, memperkuat peran Balai Latihan Kerja dengan kurikulum yang relevan dengan sektor agroindustri, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, sehingga capaian IPM Kabupaten Lamongan yang sudah berada di posisi 5 besar Jawa Timur ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Meskipun TPT belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap UMK, pemerintah Kabupaten Lamongan tetap perlu menyusun strategi penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi tenaga kerja di sektor pertanian informal yang sampai saat ini belum terlindungi oleh aturan UMK, mengingat lonjakan TPT akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di daerah ini masih rentan terhadap guncangan eksternal. Beberapa program yang dapat dijalankan antara lain pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis produk unggulan pertanian Lamongan, pemberdayaan koperasi pekerja, serta peningkatan kerja sama antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan melalui program magang dan rekrutmen tenaga kerja lokal, agar penyerapan tenaga kerja formal semakin tinggi dan angka pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan.
4. Dalam proses penetapan UMK setiap tahunnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan sebaiknya tetap mempertimbangkan secara menyeluruh ketiga faktor

yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan TPT, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, meskipun secara statistik hanya IPM yang terbukti berpengaruh signifikan secara parsial. Penetapan UMK yang didasarkan pada data dan mempertimbangkan seluruh indikator makroekonomi secara komprehensif juga diharapkan dapat menghasilkan standar kesejahteraan tenaga kerja yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Lamongan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti tingkat inflasi, biaya hidup layak, kebijakan pengupahan, atau kondisi fiskal daerah. Hal ini karena masih terdapat 10,41 persen variasi kesejahteraan tenaga kerja yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada beberapa kabupaten/kota agar dapat memberikan perbandingan mengenai kondisi kesejahteraan tenaga kerja antarwilayah.